

Nilai Eksperensial dalam Kosakata Ujaran Kebencian di Twitter: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Suriadi¹

Baharman²

¹Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar

²Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar

[1suriadi@unm.ac.id](mailto:suriadi@unm.ac.id)

[2baharman@unm.ac.id](mailto:baharman@unm.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif penggunaan fitur kosakata ujaran kebencian di Twitter. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui tiga tahap: membaca teliti *tweet-tweet* yang mengandung ujaran kebencian, mendokumentasikan *tweet* dalam bentuk tangkapan layar, serta mencatat *tweet* dalam tabel klasifikasi data. Kemudian, data dianalisis dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough berupa analisis teks, interpretasi konteks wacana, dan eksplanasi praktik sosial. Analisis data berfokus pada nilai eksperensial dalam fitur kosakata ujaran kebencian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai eksperensial kosakata ujaran kebencian terepresentasi melalui penggunaan kelebihan penyusunan kata, kata-kata ideologis, dan metafora. Kelebihan penyusunan kata merepresentasikan ujaran penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan rasialisme. Kata-kata ideologis merepresentasikan ujaran penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan seksisme. Metafora merepresentasikan ujaran penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan identitas golongan, dan rasialisme.

Kata Kunci: *nilai eksperensial, kosakata, ujaran kebencian, twitter, dan analisis wacana kritis*

Pendahuluan

Media sosial menghadirkan banyak manfaat dalam kehidupan manusia, sekaligus mengundang berbagai masalah—melalui penyalahgunaan oleh berbagai pihak. Permasalahan yang paling mengkhawatirkan terkait penyalahgunaan media sosial ini adalah maraknya penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian. Bentuk ujaran kebencian yang dimaksud diterangkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 berupa segala bentuk perbuatan yang bersifat penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong sehingga berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Ujaran-ujaran kebencian tersebut dimaksudkan untuk menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok. Rasa benci dan permusuhan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Hal itu senada dengan yang dikemukakan Kusumasari dan Arifianto (2020, hlm. 2) bahwa penyebaran teks ujaran kebencian bertujuan untuk menggiring opini publik, bahkan menyerang lawan yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi. Persebaran teks ujaran kebencian tersebut

dilakukan bukan karena ketidaksengajaan, keisengan, atau hiburan semata, tetapi memiliki agenda terselubung. Dalam bidang politik, agenda terselubung tersebut digunakan untuk mendukung kubu tertentu dan menjatuhkan kubu lainnya.

Kondisi semacam itu, tampak pada peristiwa pemilu 2019 yang memperlihatkan pertarungan ujaran kebencian antarsesama pendukung dari masing-masing capres. Para pendukung pasangan calon presiden saling melempar ujaran kebencian berupa labelisasi. Pendukung Prabowo melabeli pendukung Jokowi sebagai cebong, sedangkan pendukung Jokowi melabeli pendukung Prabowo sebagai kampret. Tagar untuk mendukung pilihan masing-masing pun viral di media sosial. Tagar *#2019gantipresiden* dilempar oleh pendukung Prabowo, sedangkan tagar *#2019tetapjokowi* dilempar oleh pendukung Jokowi. Tagar tersebut disertai ejekan-ejekan berupa labelisasi provokatif sehingga menciptakan sekat-sekat dan gesekan dalam kehidupan masyarakat. Terkait hal itu, Angraeni & Andrinoviarini (2020, hlm. 99) mengemukakan bahwa tahun-tahun politik memang menjadi wahana subur untuk penyebaran ujaran kebencian, berbagai bentuk intoleransi dan berita bohong menghiasi jagat media sosial.

Dari fakta-fakta peredaran ujaran kebencian dalam media sosial tersebut, peneliti akan berfokus menganalisis kosakata labelisasi ujaran kebencian dalam media sosial *Twitter*. Hal itu dikarenakan banyaknya pengguna *Twitter* di Indonesia seperti data dari *Katadata.co.id* yang memberitahukan bahwa pada tahun 2016 pengguna *Twitter* di Indonesia berada di peringkat ketiga terbesar di dunia, setelah India dan Amerika dengan jumlah pengguna sebanyak 24,3 juta. Meskipun dua tahun terakhir penggunaannya mengalami penurunan berdasarkan data *CNBC Indonesia* per tanggal 27 Juli 2018, tetapi banyak tokoh-tokoh masyarakat atau politik yang menggunakan *Twitter* sehingga memicu warganet berbondong-bondong bersuara pada akun-akun yang bersangkutan—ada yang mendukung dan ada yang menyerang. Ketika mendukung dan menyerang *twit* para tokoh masyarakat atau politik tersebut, komentar warganet biasanya disertai ujaran kebencian pada pihak yang tidak disukainya. Kenyataan itu membuat produksi dan reproduksi ujaran kebencian semakin marak di *Twitter*.

Ujaran kebencian dalam *Twitter* tersebut dianalisis menggunakan pisau bedah analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menganalisis nilai eksperensial kosakata ujaran kebencian. Peneliti menggunakan kerangka analisis Norman Fairclough karena ujaran kebencian tidak terlepas dari praktik ideologi dan praktik kekuasaan. Praktik ideologi dan kekuasaan tersebut akan dianalisis dalam tiga dimensi, yakni: teks (deskripsi penggunaan fitur lingual), interaksi/praktik kewacanaan (proses produksi dan interpretasi), dan konteks/praktik sosiokulturalan (eksplanasi analisis sosial). Melalui ketiga dimensi wacana Norman Fairclough tersebut, agenda-agenda tersembunyi dari penggunaan teks dapat diketahui.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji ujaran kebencian dilakukan oleh Erjavec & Kovačić (2012) dengan menganalisis ujaran kebencian yang tampil melalui komentar-komentar di situs web berita. Penelitiannya tersebut bertujuan untuk mengungkap karakteristik dan motif ujaran kebencian dari data yang ditemukan. Penelitian ujaran kebencian juga dilakukan oleh Miro-Llinares & Rodriguez-Sala (2016) yang mengkaji fenomena komunikasi kekerasan dan pesan-pesan kebencian di *Twitter*. Penelitiannya tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan *twit-twit* yang mengandung ungkapan kekerasan atau ujaran kebencian. Selanjutnya, Widodo (2017) mengkaji ujaran kebencian terhadap pejabat publik di media sosial. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi perbedaan jenis, mendeskripsikan strategi, dan mendeskripsikan karakteristik bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji ujaran kebencian menggunakan kerangka analisis Norman Fairclough. Penelitian ujaran kebencian yang berfokus pada nilai eksperensial dalam fitur kosakata menggunakan teori Norman Fairclough, belum pernah dilakukan. Maka dari itu, motif-motif ujaran kebencian dalam Twitter yang ditemukan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan kerangka analisis tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Dalam artian, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap makna-makna tersembunyi dari berbagai data kualitatif yang merepresentasikan fenomena sosial melalui pendeskripsian kritis. Hal itu sejalan dengan pernyataan Cresswell (2013, hlm. 4) bahwa penelitian kualitatif berupaya menggali dan memahami makna yang berasal dari masalah penelitian. Data dalam penelitian ini adalah kumpulan twit yang penggunaan kosakatanya diidentifikasi mengandung ujaran kebencian. Data dikumpulkan dan disajikan dalam tiga teknik: teknik baca dengan membaca teliti twit-twit yang mengindikasikan ujaran kebencian, teknik dokumentasi dengan melakukan tangkapan layar pada twit-twit yang diidentifikasi mengandung ujaran kebencian; dan teknik catat dengan mencatat semua data yang ditemukan pada tabel klasifikasi. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam tiga tahapan: mendeskripsikan fitur lingual, menginterpretasi praktik kewacanaan, dan mengeksplanasi praktik sosiokultural. Tahapan-tahapan analisis tersebut berfokus pada nilai eksperensial kosakata-kosakata ujaran kebencian yang tampil dalam twit-twit yang telah dikumpulkan.

Hasil

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil analisis tersebut dipaparkan sebagai berikut.

Kelebihan Penyusunan Kata/Leksikal (*overwording*)

Kelebihan penyusunan kata/leksikal merupakan penyusunan kata yang kerap melibatkan banyak kata yang berdekatan maknanya atau bersinonim. Kelebihan penyusunan kata memiliki tujuan menegaskan kesan atau memberikan pernyataan berlebihan. Lebih jelasnya, kosakata yang ditemukan ditampilkan berikut ini.

(1) Kosakata yang ditemukan: *makan tai, kepalanya kotoran semua, otak pun gak punya, dungu permanen, dan koar-koar seenaknya.*

Kutipan: Kampret Sejati @KampretSejati4: "Percuma debat ma cebong, apalagi Cebongnya masih *makan tai* di *kepalanya kotoran semua, otak pun gak punya* ai cebong makanya *dungu permanen*, liat aja kepalanya hmpir mulut semua, *koar-koar seenaknya.*"

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *makan tai, kepalanya kotoran semua, otak gak punya, dungu permanen, dan koar-koar seenaknya*. Kelima kosakata tersebut memiliki makna yang mirip. Makna yang dimiliki oleh kelima kosakata tersebut mengarah pada ketidakmampuan menggunakan pikiran. Penggunaan kelima kosakata itu untuk menegaskan atau memberikan penekanan berlebihan mengenai makna

tersebut. Maka dari itu, kelima kosakata tersebut merupakan bentuk kelebihan penyusunan kata (*overwording*).

Situasi yang terjadi dalam kutipan di atas adalah proses berdebat antara pendukung capres tertentu. Dalam debat tersebut partisipan melabeli pendukung capres lainnya dengan kata-kata *makan tai*, *kepalanya kotoran semua*, *otak pun gak punya*, *dungu permanen*, dan *koar-koar seenaknya*. Partisipan mengeluarkan pelabelan itu agar sesamanya tidak perlu meladeni debat pendukung capres lainnya. Kosakata yang digunakan partisipan ingin menstigmakan pendukung kubu sebelah sebagai golongan tidak berpikir.

Selanjutnya, penggunaan kosakata oleh partisipan memunculkan presuposisi bahwa berdebat dengan kubu sebelah hanya akan menghasilkan debat kusir. Obrolan-obrolan yang mengarah pada substansi pembicaraan akan sulit dicapai. Partisipan bermaksud membangun opini bahwa kejernihan berpikir bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di pemikiran pendukung kubu sebelah. Maka dari itu, penggunaan kelima kosakata tersebut diidentifikasi sebagai kosakata yang mengandung ujaran kebencian. Hal itu karena kelima kosakata tersebut menggambarkan penghinaan identitas golongan dari objek yang dituju.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan untuk memberikan pelabelan-pelabelan pada pendukung capres lain. Kemudian, ideologi yang berusaha dibangun partisipan dengan menggunakan kosakata tersebut adalah citra kubu sebelah sebagai golongan yang amat dungu. Dengan memberikan citra demikian pada kubu sebelah, partisipan juga telah membangun citra sebaliknya pada kubunya. Hal itu dimaksudkan untuk membangun opini bahwa kubu partisipan adalah golongan dari orang-orang yang mampu menggunakan pikiran secara bijak—sebagaimana seharusnya pikiran digunakan.

Selanjutnya, penggunaan kosakata tersebut berusaha menggiring pemikiran masyarakat untuk menilai kubu lawan sebagai golongan irasional, sedangkan kubu partisipan sebagai golongan rasional. Efek sosial yang dapat ditimbulkan adalah adanya anggapan terhadap pendukung kubu lawan sebagai orang-orang yang memiliki logika berpikir yang kacau sehingga mendukung pihak yang salah. Usaha tersebut dilakukan secara jelas melalui kosakata yang digunakan oleh partisipan. Hal itu bertujuan untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan kubu partisipan sebagai golongan yang senantiasa akan bermanfaat bagi masyarakat. Fenomena bahasa seperti itu yang dikatakan Fairclough (2003, hlm. 19) bahwa secara sentral bahasa memiliki kekuatan, sebagai sarana pencapaian kekuasaan, dan memiliki ideologi tertentu.

(2) Kosakata yang ditemukan: *cemen* dan *pengecut*

Kutipan: PembasmiKutuNKRI @peyutendutz: “otak seupil sprt dani *cemen*, kmrn pas debat mana berani ngomong ginian!
Pengecut tetaplah pengecut”

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *cemen* dan *pengecut*. Kedua kosakata itu memiliki makna yang mirip. Makna yang dimiliki oleh kedua kosakata tersebut adalah ketiadaan rasa berani. Penggunaan kedua kosakata itu untuk mempertegas makna tersebut. Maka dari itu, kedua kosakata yang digunakan pada teks di atas termasuk dalam kategori kelebihan leksikal.

Situasi yang terjadi dalam kutipan di atas adalah pemberian label terhadap politisi tertentu. Partisipan menggunakan kosakata *cemen* dan *pengecut* untuk melabeli Dhani. Hal itu dilakukan partisipan sebagai respons terhadap tindakan Dhani yang banyak bicara di media sosial dan sewaktu berdebat langsung di salah satu acara, dia

tidak berkutik. Partisipan menggunakan pelabelan tersebut untuk menstigmakan Dhani sebagai orang yang hanya berani cerita belakang.

Selanjutnya, penggunaan kosakata oleh partisipan memunculkan presuposisi bahwa Dhani tidak memiliki keberanian dalam menghadapi perdebatan. Kebiasaan Dhani hanya berani banyak bicara ketika tidak sedang berhadapan langsung dengan orang lain. Maka dari itu, kedua kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena merendahkan citra Dhani sebagai manusia.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan untuk memberikan pelabelan-pelabelan demikian pada Dhani. Secara ideologis, partisipan ingin membangun opini bahwa Dhani sebagai orang yang tidak memiliki keberanian untuk beradu gagasan secara langsung. Citra tersebut sedikit banyak akan memberikan efek pada institusi atau kubu yang sedang dibela atau dikampanyekan Dhani. Efek yang muncul secara institusional akan membangun citra bahwa kubu Dhani yang senantiasa mengklaim diri sebagai kesatria, ternyata terdapat orang yang berkarakter sebaliknya.

Kemudian, pada level masyarakat akan menggiring pemikiran masyarakat bahwa Dhani adalah orang yang memiliki karakter bermasalah dan kemungkinan orang-orang di sekelilingnya juga demikian. Efek sosial yang ditimbulkan memunculkan anggapan kepada Dhani sebagai politisi yang tidak perlu diperhitungkan. Efek-efek tersebut berusaha dimunculkan secara jelas melalui penggunaan kosakata *cemen* dan *pengecut* oleh partisipan. Hal itu untuk mempertahankan kekuasaan kubu partisipan sebagai kubu petahana yang senantiasa memiliki keberanian mendebati setiap gagasan yang menyerang mereka. Tentunya, hal itu akan memapankan citra petahana sebagai pemenang dan layak menjadi pemenang lagi pada kontestasi pemilu berikutnya. Femonema bahasa demikian yang dianggap Castells (2009, hlm. 3) sebagai wujud kekuatan yang paling fundamental, berupa kemampuan membentuk pola pikir manusia.

(3) Kosakata yang ditemukan: *ga berguna, goblok, miskin terbelakang, ga ada manfaatnya, dan doyan mabok*

Kutipan: Penyair Radikal @DatuakPanduko: "NTT provinsi yg *ga berguna..* Orang nya *goblok2..Miskin terbelakang..*Krisis air bersih..*Ga ada manfaat nya* utk indonesia..Cuma NTT ini berguna dlm Strategis militer..Mencegah serangan pembuka dari australi..Itu aja fungsi nya..Selebihnya *goblok..*Gubernur *doyan mabok.*"

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *ga berguna, goblok, miskin terbelakang, ga ada manfaatnya, dan doyan mabok*. Kosakata-kosakata tersebut mengarah pada makna yang mirip. Kelima kosakata itu mengarah pada makna ketidakmampuan memberikan manfaat. Maka dari itu, penggunaan kelima kosakata tersebut termasuk dalam kategori kelebihan penyusunan kata.

Situasi yang terjadi dalam kutipan di atas adalah partisipan memberikan label-label negatif pada Provinsi NTT dan warganya. Partisipan memberikan label demikian sebagai respons atas dilegalkannya minuman keras lokal oleh Pemprov NTT. Kelima kosakata yang digunakan partisipan untuk memberikan identitas kepada Provinsi NTT sebagai provinsi yang bermasalah.

Selanjutnya, penggunaan kosakata yang digunakan partisipan memunculkan presuposisi bahwa Provinsi NTT merupakan provinsi yang memiliki warga yang tidak hanya miskin dan bodoh, tetapi juga gemar bermabuk-mabukan. Partisipan bermaksud membangun opini bahwa Provinsi NTT dihuni oleh orang-orang yang menyedihkan.

Maka dari itu, penggunaan kosakata tersebut merupakan ujaran kebencian berbentuk rasialisme—ujaran yang merendahkan ras atau suku atau etnis tertentu.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan untuk memberikan pelabelan terhadap masyarakat NTT. Secara ideologis, partisipan sedang membangun citra masyarakat NTT sebagai masyarakat yang tampak memprihatinkan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menggunakan pemikiran dan memberikan manfaat pada sesama. Citra tersebut yang terbangun dari kosakata-kosakata yang digunakan partisipan.

Kemudian, secara institusional partisipan berusaha membangun citra Provinsi NTT sebagai basis pendukung kubu petahana yang berupa masyarakat dengan kelakuan yang sangat buruk. Efek sosial yang ditimbulkan dari pelabelan itu memunculkan anggapan perihal betapa kacaunya kondisi masyarakat NTT sehingga wajar mendukung kubu petahana. Hal itu memunculkan stigma bahwa pendukung kubu petahana merupakan orang-orang yang bermasalah—orang-orang bermasalah akan mendukung sesamanya. Terkait fenomena bahasa yang demikian, Anshori (2017, hlm. 187) mengemukakan bahwa bahasa memiliki fungsi kontrol sosial—sebagai alat untuk memengaruhi dan membingkai pemikiran publik.

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas, penggunaan fitur lingual kelebihan penyusunan kata menunjukkan motif-motif tertentu. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa partisipan menggunakan kosakata-kosakata yang berdekatan maknanya untuk memberikan pemaknaan berlebihan pada pelabelan-pelabelan yang diberikan kepada pihak yang dituju. Ujaran kebencian yang ditemukan melalui penggunaan fitur lingual kelebihan penyusunan kata berupa ujaran penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan penghinaan pada ras atau kesukuan (rasialisme).

Ujaran kebencian yang berupa penghinaan pada pribadi orang lain ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *cemen* dan *pengecut*. Kosakata-kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena mengandung makna yang menghina dan merendahkan martabat orang yang dituju. Ujaran tersebut dapat merugikan orang yang dimaksud dalam kehidupan masyarakat karena pelabelan yang diberikan akan cenderung menggiring orang lain untuk menganggapnya demikian. Hal itu senada dengan pandangan Anshori (2008, hlm. 5) bahwa penjulukan atau pelabelan merugikan orang lain karena sangat kuat memengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap orang yang diberikan julukan.

Kemudian, ujaran kebencian berupa penghinaan identitas golongan ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *makan tai*, *kepalanya kotoran semua*, *otak pun gak punya*, *dungu permanen*, dan *koar-koar seenaknya*. Kosakata-kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena konteks penggunaannya ditujukan untuk menghina kelompok tertentu atas keberpihakan politiknya. Hal itu senada dengan pandangan Ghanea (dalam Anam dan Hafiz, 2015, hlm. 347) bahwa ujaran kebencian dapat berupa penjulukan untuk melecehkan orang-orang yang terikat pada kelompok tertentu sebagai bentuk ekspresi penghinaan untuk memunculkan kesengsaraan psikologis kepada targetnya. Begitu pun dengan penggunaan kosakata-kosakata tersebut, ditujukan untuk memberikan penghinaan kepada para pendukung Jokowi sehingga mendiskreditkan mereka dengan julukan demikian. Penjulukan tersebut membentuk persepsi bahwa orang-orang yang mendukung Jokowi merupakan orang-orang yang mengabaikan fungsi-fungsi akalinya.

Selanjutnya, ujaran kebencian berupa rasialisme ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *ga berguna*, *goblok*, *miskin terbelakang*, *ga ada manfaatnya*, dan

doyan mabok. Kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena penggunaannya ditujukan untuk menghina masyarakat NTT. Kosakata-kosakata itu membangun persepsi yang diskriminatif terhadap masyarakat NTT sebagai ras yang tidak memiliki keunggulan intelektual. Fenomena seperti itu merupakan bentuk fenomena rasialisme karena memberikan prasangka-prasangka yang buruk pada ras tertentu. Hal itu senada dengan penjelasan Perdana (2009, hlm. 140) bahwa rasialisme merupakan perilaku diskriminatif yang terbentuk dari pola kehidupan masyarakat yang memberikan citra negatif kepada ras tertentu berupa perilaku jahat atau buruk.

Kata-Kata Ideologis

Kata-kata ideologis merupakan penggunaan kosakata secara berulang dalam suatu wacana untuk menekankan atau mempertegas makna yang terkandung pada kosakata tersebut. Kemunculan kata-kata ideologis cenderung tampak tumpang tindih karena digunakan secara berlebihan. Penggunaan kata-kata ideologis ini memiliki maksud terselubung untuk menguatkan pemaknaan pada yang dituju.

(4) Kosakata yang ditemukan: *anjing*

Kutipan: **Anti PKI Perjuangan** @KangHaji11: "Si *Anjing* @permadiaktivis bin Bangsati...kan makannya dr Komentar ngawurnya..Dasar *Anjing* ya kelakuannya begitu. Kalo ada takdir ketemu si *Anjing* @permadiaktivis ..ane tampol congornya sampe rontok 4 giginya tuh..!!!"

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *anjing* yang digunakan secara berulang. Kosakata tersebut bermakna serapahan atau berfungsi menyumpahi. Penggunaan kosakata itu untuk menyerapahi atau menyumpahi Permadi Arya. Penggunaan kosakata secara berulang untuk menekankan serapah tersebut. Maka dari itu, kosakata *anjing* pada kutipan di atas termasuk dalam kategori fitur lingual kata-kata ideologis.

Situasi yang terjadi pada kutipan tersebut adalah perihal partisipan yang memberikan pelabelan *anjing*. Partisipan menunjukan pelabelan kepada Permadi Arya sebagai respons atas twitnya. Kosakata *anjing* yang digunakan partisipan sebagai ekspresi kekesalannya terhadap Permadi Arya yang terkesan merendahkan Islam. Partisipan menggunakan kosakata *anjing* untuk memberikan identitas kebinatangan kepada Permadi Arya.

Selanjutnya, penggunaan kosakata tersebut memunculkan presuposisi bahwa Permadi Arya memiliki kesamaan dengan anjing. Sebagaimana anjing, Permadi Arya diposisikan sebagai orang yang senang menggonggong orang lain. Maka dari itu, penggunaan kosakata *anjing* dinilai sebagai ujaran kebencian karena menghina pribadi Permadi Arya dengan mengumpakannya sebagai binatang.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan untuk memberikan pelabelan negatif pada orang lain. Secara ideologis, kosakata *anjing* yang digunakan oleh partisipan bertujuan untuk membentuk opini pembaca bahwa Permadi Arya adalah manusia dengan kelakuan binatang. Dengan memberikan citra demikian, maka setiap perkataan Permadi Arya dianggap sebagai gonggongan semata. Pemberian label yang demikian oleh Becker (1973, hlm. 180) dikatakan sebagai suatu upaya untuk mempersulit orang yang dituju melakukan rutinitas normal dalam kehidupan sehari-harinya.

Kemudian, penggunaan kosakata yang dilakukan partisipan berusaha memberikan efek secara kemasyarakatan untuk menggiring pemikiran masyarakat menggonggong Permadi Arya seperti yang dilabelkan. Upaya tersebut dilakukan secara

jelas melalui penggunaan kosakata *anjing* secara berulang—agar gagasan tersebut tertanam dalam pemikiran pembaca. Dengan melakukan itu, partisipan juga berusaha memunculkan efek sosial terhadap Permadi Arya sebagai manusia yang menjijikkan dan harus dihindari—sebagaimana anjing sebagai binatang yang paling dihindari dan dianggap najis dalam masyarakat Islam.

(5) Kosakata yang ditemukan: *kelompok bahlul*

Kutipan: **Teddy Gusnaldi** @TeddyGunaidi: “*Kelompok Tahayul* itu bagian dari *kelompok bahlul*. Kerjanya berhalusinasi untuk dapatkan nasi dengan membela *si bahlul*. [emotikon senyum lebar 1x]

Pro Kebenaran @Risingf93953426: *Kelompok bahlul* yg makin frustrasi jagoannya kalah melulu. Lumayan dpt makan gratis sekalian piknik.”

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *kelompok bahlul*. Kosakata itu digunakan secara berulang. Pengulangan itu bertujuan menekankan makna kelompok yang tidak mampu menggunakan pikiran. Dengan demikian, penggunaan kedua kosakata tersebut merupakan fenomena kata-kata ideologis.

Situasi yang terjadi pada kutipan di atas adalah percakapan antarpendukung capres tertentu yang sedang melabeli pendukung dari capres lain. Partisipan menggunakan kosakata *kelompok bahlul* untuk melabeli kubu oposisi. Partisipan memberikan pelabelan tersebut atas tindakan pendukung kubu oposisi melakukan demonstrasi menolak hasil pemilu. Melalui kosakata yang digunakan, partisipan menstigmakan kubu oposisi sebagai sekumpulan orang yang frustrasi dan penuh halusinasi.

Selanjutnya, penggunaan kosakata tersebut akan memunculkan presuposisi bahwa pendukung kubu posisi merupakan orang-orang yang gemar melakukan hal-hal bodoh atau tidak masuk akal. Citra tersebut memberikan citra negatif pada kubu oposisi dan menggeneralkan kelompoknya berkepribadian demikian. Maka dari itu, penggunaan kosakata *kelompok bahlul* merupakan fenomena ujaran kebencian karena merendahkan pihak lain.

Selain itu, pada kutipan di atas, partisipan tampak memiliki kekuasaan memberikan pelabelan negatif pada pihak lain. Secara ideologis, melalui kosakata *kelompok bahlul* partisipan berusaha membangun pemikiran bahwa ada sekelompok orang yang gemar dan rela melakukan hal-hal irasional demi makan gratis. Dengan membangun citra tersebut, pada level kemasyarakatan akan memunculkan anggapan bahwa kelompok tersebut adalah sebodoh-bodohnya golongan.

Hal demikian yang berusaha dibangun partisipan dengan memberikan pelabelan tersebut. Pada level institusional, penggunaan kosakata itu berusaha menanamkan citra buruk pada pihak oposisi dan membangun citra positif pada pihak petahana. Usaha-usaha tersebut tampak jelas melalui pemilihan kosakata yang digunakan. Dengan melakukan demikian, partisipan berusaha mempertahankan kekuasaan petahana sebagai pihak yang memang layak menjadi pemenang. Fenomena bahasa yang demikian seperti yang dikemukakan Santoso (2012, hlm. 7) bahwa orang-orang yang terampil berbahasa, menggunakan bahasa sebagai alat untuk merekayasa orang lain—mengontrol perilaku individu, komunitas, atau masyarakat.

(6) **Kosakata yang ditemukan:** *bencong*

Kutipan: Penyair Radikal @DatuakPanduko: “Liat tuh Buya Kivlan zein.. Bandingkan dg ulama youtube..Yg rata2 *bencong*..Ulama amplop..Ulama di 01 *bencong semua*..Ulama di 02 hampir 99,9% *bencong*...Halah mental pelacur..Gara2 kalian indonesia di jajah..Gara2 sikap kalian yg terlalu mengalah..Goblok”

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *bencong* yang digunakan berulang kali. Juga terdapat kosakata *mental pelacur* dan *goblok* yang bertujuan mendukung makna dari kosakata *bencong*. Kosakata-kosakata tersebut mengarah pada makna ketiadaan sikap tegas atau sikap berani. Kosakata *bencong* pun digunakan beberapa kali untuk menegaskan makna tersebut. Dengan demikian, penggunaan kosakata *bencong* pada kutipan di atas termasuk ke dalam fenomena kata-kata ideologis.

Situasi yang terjadi dalam kutipan di atas adalah adanya pelabelan negatif yang ditujukan kepada ulama. Partisipan memberikan label *bencong* kepada ulama karena dianggap tidak memiliki keberanian atau ketegasan. Pelabelan tersebut disertai tuduhan bahwa Indonesia dijajah karena sikap mereka yang demikian. Kosakata-kosakata yang digunakan partisipan tersebut menstigmakan ulama sebagai golongan yang tidak bisa berbuat apa-apa, selain menurut pada keadaan.

Kemudian, penggunaan kosakata *bencong* yang berulang kali memunculkan presuposisi bahwa ulama-ulama di Indonesia hanyalah ulama bayaran, memiliki mental dan pemikiran yang bermasalah. Tidak akan dijumpai ulama yang berani menentang keadaan buruk yang terjadi di keseharian. Hal itu yang berusaha ditekankan partisipan melalui kosakata yang dia gunakan. Maka dari itu, penggunaan kosakata tersebut termasuk dalam kategori ujaran kebencian karena telah menghina ulama.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan memberikan pelabelan buruk pada ulama. Terutama secara institusi, partisipan telah merendahkan ulama sebagai pemuka agama dan panutan bagi masyarakat. Apalagi ujaran yang diberikan berbentuk seksisme—diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin atau gender—yang disertai stereotip-stereotip bagaimana seharusnya jenis kelamin bersikap. Kosakata *bencong* pada kutipan di atas bukan hanya menghina ulama, tetapi juga menghina gender waria—sebab dilekatkan pada stereotip bermental lemah.

Ideologi yang berusaha dibangun partisipan dengan penggunaan kosakata tersebut adalah ulama yang berterima dengan keadaan berarti ulama yang tidak memiliki keberanian. Efek sosial yang berusaha dimunculkan adalah berupa anggapan bahwa ulama-ulama yang berada di kubu petahana dan ulama-ulama yang tidak terlibat dalam penolakan kekuasaan Jokowi merupakan ulama-ulama yang tidak layak didengar dan diteladani. Efek sosial itu pun dapat memunculkan prasangka buruk kepada ulama sebagai sosok yang menggadaikan keyakinan agamanya demi berdamai dengan kekuasaan.

Usaha-usaha itu yang secara terselubung sedang diusung oleh partisipan melalui kosakata-kosakata yang dia gunakan. Pada level institusi berusaha menampilkan ulama yang berterima dengan hasil pemilu sebagai sosok yang lemah. Sementara, pada level kemasyarakatan, pihak yang telanjur tidak menyukai pemerintah akan terhasut untuk berpikiran serupa terhadap ulama. Jika terjadi dengan massif, akan menimbulkan kekacauan dan perpecahan karena posisi ulama tidak lagi diperhitungkan. Kekuatan dan kekuasaan kosakata itu yang berusaha ditanamkan partisipan kepada pemikiran

pembaca—agar senantiasa tidak memercayai hasil pemilu yang telah diputuskan KPU maupun MK. Fenomena bahasa yang demikian oleh Santoso (2016, hlm. 227) dikatakan sebagai bentuk penggunaan bahasa yang semakin menunjukkan perannya sebagai instrumen membentuk perspektif dalam rangka hegemoni. Dalam hal ini, menghegemoni orang lain melalui opini-opini yang terbangun dari kosakata-kosakata yang digunakan.

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas, penggunaan fitur lingual kata-kata ideologis menunjukkan maksud-maksud terselubung. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa partisipan menggunakan kosakata-kosakata secara berulang dalam suatu wacana untuk menekankan atau mempertegas makna yang terkandung pada kosakata tersebut. Ujaran kebencian yang ditemukan melalui penggunaan fitur kosakata berupa penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan seksisme.

Kosakata ujaran kebencian berupa penghinaan pribadi ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *anjing*. Kosakata-kosakata itu diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena memuat makna-makna yang merendahkan martabat pribadi orang yang dituju. Melalui pelabelan yang diberikan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang yang dimaksud dalam kehidupan sosial. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa tindakan diskriminasi, marginalisasi, dan ekspresi-ekspresi yang merugikan lainnya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiyati (2017, hlm. 36) bahwa ujaran kebencian bertujuan untuk menyingkirkan seseorang dengan memberikan intimidasi berupa rumor-rumor jahat sehingga menjatuhkan kepercayaan dirinya dan menghasut orang-orang sekitar untuk membenci korban. Dengan demikian, ujaran kebencian menjadi sangat berbahaya bagi korban karena mengeksploitasi citra dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian, ujaran kebencian berupa penghinaan pada identitas golongan ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *tukang bohong* dan *kelompok bahlul*. Kosakata-kosakata itu diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena penggunaannya untuk mendiskreditkan kelompok yang dimaksud. Melalui pelabelan-pelabelan yang diberikan dapat melemahkan kedudukan atau status kelompok yang dituju pada lingkungan sosial. Kondisi tersebut sangat mencederai nama baik kelompok yang dilekatkan pelabelan negatif sehingga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kelompok itu. Konsekuensi logis yang disebabkan atas keadaan yang demikian, masyarakat terpolarisasi menjadi golongan yang membela korban pelabelan atau menjadi golongan yang mendukung pelabelan yang diberikan. Hal itu sangat berbahaya, seperti yang dikemukakan Ahnaf dan Suhadi (2014, hlm. 163) bahwa ujaran kebencian dapat menciptakan ketegangan dan polarisasi sektarian dalam konteks tertentu di kehidupan masyarakat sehingga dengan mudah mengundang munculnya eskalasi konflik.

Selanjutnya, ujaran kebencian berupa seksisme ditunjukkan melalui penggunaan kosakata *bencong*. Penggunaan kosakata *bencong* diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena konteksnya ditujukan untuk menggambarkan karakter yang penakut dan tidak memiliki ketegasan. Penggambaran itu dikategorikan ke dalam fenomena seksisme karena mengasosiasikan tindakan demikian sebagai tindakan banci—yang merendahkan status jenis kelamin atau gender orang lain. Seksisme didefinisikan sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender seseorang, baik yang dirasakan atau yang terjadi (Barthelemy, R.S., McCormick, M., & Henderson, 2016, hlm. 3). Diskriminasi jenis kelamin atau gender tersebut berupa pemberian stereotip maskulin kepada laki-laki dan feminim kepada perempuan—yang kemudian mendikte

bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap. Selanjutnya dikte-dikte tersebut memunculkan gagasan maskulinitas yang mengharuskan ketegasan, aktif, lincah, dan cepat mengambil inisiatif, sedangkan gagasan feminitas mengharuskan kelembutan, pasif, dan emosional (Walby, 2014, hlm. 135). Dari sinilah konsep ketika laki-laki tidak memenuhi kriteria maskulinitas, maka akan dilekatkan dengan pelabelan banci.

Metafora

Metafora adalah sebuah makna yang mewakili satu aspek pengalaman dari yang lain. Metafora digunakan untuk mengonkretkan konsep yang abstrak dengan kosakata yang dapat dijangkau langsung maknanya. Aspek pengalaman apa pun dapat diwakili dalam berbagai bentuk metafora. Hal itu ditunjukkan melalui hubungan antara pilihan metafora. Perbedaan metafora mempunyai perbedaan tambahan ideologis. Adapun penggunaan metafora dalam pemberitaan ditampilkan berikut ini.

(7) **Kosakata yang ditemukan:** *politisi comberan*

Kutipan: Nur @NurRotan: "Saya percaya, dalam diskusinya SBY tidak memaksa Prabowo. Namun *politisi comberan* di sekitarnya membuat SBY menunda keputusan. Besok SBY akan memberi dukungan, dengan wajah yang telah dilukai kader dungunya."

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *politisi comberan*. Kosakata tersebut bermakna politisi yang penuh kotoran atau tidak bersih. Penggunaan kosakata tersebut merupakan bentuk metafora karena mengumpamakan manusia sebagai comberan. Pengumpamaan itu menekankan makna pada orang dituju sebagai orang yang sering bermain kotor.

Situasi yang terjadi pada kutipan di atas berupa pemberian label *politisi comberan* kepada politisi tertentu. Partisipan memberikan label tersebut pada politisi di sekitar SBY. Partisipan memberikan label tersebut terkait sikap yang akan diambil SBY untuk berkoalisi dengan capres yang dia dukung. Pelabelan itu digunakan partisipan untuk memberikan identitas politisi kotor kepada politisi yang dianggap menghalang-halangi SBY.

Kemudian, penggunaan kosakata yang digunakan partisipan telah memunculkan presuposisi bahwa di sekeliling SBY terdapat politisi kotor yang dapat memengaruhi SBY dalam bersikap. Presuposisi tersebut memberikan citra negatif terhadap kader-kader partai SBY. Maka dari itu, kosakata yang digunakan oleh partisipan merupakan kosakata yang mengandung ujaran kebencian karena merendahkan pihak lain.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan untuk memberikan pelabelan *politisi comberan* kepada kader partai SBY. Secara ideologis, partisipan sedang membangun citra kader-kader partai SBY sebagai kader-kader yang penuh intrik kotor. Hal itu yang berusaha ditekankan partisipan dengan menggunakan kosakata tersebut.

Melalui penggunaan kosakata *politik comberan*, partisipan berusaha memberikan efek-efek sosial terhadap keputusan yang akan diambil SBY. Pada level institusional berusaha memberikan citra negatif kepada kubu partai SBY jika tidak memihak kepada kubu yang dia dukung. Secara kemasyarakatan, partisipan menggiring pemikiran masyarakat bahwa jika SBY tidak bergabung di kubu yang dia dukung, berarti telah dipengaruhi oleh kader-kadernya yang busuk. Dengan usaha-usaha yang dilakukan partisipan tersebut, telah membentuk opini bahwa pihak-pihak yang tidak mendukung kubu yang dia dukung merupakan politisi yang busuk. Fenomena bahasa demikian sesuai yang dikemukakan Fairclough (2003, hlm. 11) bahwa orang-orang memanipulasi

bahasa dengan tujuan strategis. Suatu bentuk penggunaan bahasa yang merepresentasikan pertarungan kekuasaan, bukan sekadar dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral (Eriyanto, 2011, hlm. 11).

(8) Kosakata yang ditemukan: *muka tembok*

Kutipan: Ardian ZA @ArdianZA_099: "Dasar manusia tdk tau diri.
Emang dasar kampret muka nya ya *muka tembok*"

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *muka tembok*. Kosakata tersebut bermakna tidak memiliki rasa malu. Penggunaan kosakata pada teks di atas merupakan bentuk metafora karena mengumpamakan wajah manusia dengan tembok. Pengumpamaan itu menekankan makna pada orang yang dituju sebagai orang yang tidak memiliki rasa malu sama sekali.

Situasi yang terjadi pada kutipan di atas adalah perihal pemberian label negatif kepada politisi tertentu. Partisipan memberikan label *muka tembok* kepada Eggi Sudjana. Pelabelan tersebut respons atas berita tentang Eggi Sudjana yang berterima kasih kepada Prabowo setelah bebas dari rutan. Dengan menggunakan kosakata tersebut, partisipan memberikan identitas bahwa di kubu oposisi terdapat orang yang tidak memiliki rasa malu.

Kemudian, penggunaan kosakata *muka tembok* akan memunculkan presuposisi bahwa pihak kubu oposisi menampung orang-orang yang tidak tahu malu. Pelabelan tersebut membentuk opini bahwa para pendukung kubu oposisi merupakan sekumpulan orang yang urat malunya telah putus. Maka dari itu, penggunaan kosakata itu merupakan ujaran kebencian karena menghina orang lain.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan memberikan pelabelan negatif kepada pihak yang dituju. Secara ideologis partisipan berusaha membangun pemikiran bahwa kubu oposisi memiliki pendukung yang tidak memiliki rasa malu. Politisi yang tidak memiliki rasa malu merupakan politisi yang amat berbahaya bagi bangsa. Opini itu yang berusaha dibentuk partisipan dengan menggunakan kosakata *muka tembok*.

Melalui kosakata *muka tembok*, partisipan berusaha memunculkan efek-efek sosial terhadap orang yang dilabeli. Pada level institusional partisipan berusaha menjatuhkan kubu oposisi dengan citra tersebut dan membangun citra sebaliknya pada kubu yang dia dukung. Pada level kemasyarakatan partisipan berusaha menggiring pemikiran masyarakat untuk menganggap bahwa kubu sebelah adalah kubu yang bermasalah. Dengan usaha tersebut, secara terselubung partisipan juga berusaha memapankan kekuasaan kubu yang didukungnya. Fenomena bahasa yang demikian merupakan bentuk penggunaan bahasa sebagai medium efisien untuk pengodean kategori-kategori sosial—struktur-struktur bahasa menggiring pembaca pada perspektif tertentu (Fowler, 1986, hlm. 16).

(9) Kosakata yang ditemukan: *cina-cina kafir komunis tiongkok, cina kafir, dan rezim komunis*

Kutipan: sabila gusti @SabilaGusti: "PEMILU paling mematikan karena
ADA CINA2 KAFIR KOMUNIS TIONGKOK dan CINA2 KAFIR 9
KUTU YG INGIN MERAMPOK NKRI dan MENGHANCURKAN
ISLAM !!, MELALUI BONEKA MEREKA: REZIM KOMUNIS !!,
YG MENGHALALKAN KEJAHATAN UTK MENCAPAI
TUJUANNYA TSB !!"

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *cina-cina kafir komunis tiongkok, cina kafir, dan rezim komunis*. Kosakata-kosakata tersebut merupakan metafora berbentuk sarkasme. Penggunaan ketiga kosakata itu mengarah pada pemaknaan bahwa sumber

segala permasalahan adalah orang-orang China. Makna itu yang berusaha ditekankan oleh kosakata-kosakata yang tampil pada kutipan di atas.

Situasi yang terjadi pada kutipan di atas adalah pemberian label negatif pada ras tertentu. Partisipan memberikan label *cina-cina kafir komunis tiongkok* dan *cina kafir 9 kutu* kepada orang China serta *rezim komunis* kepada pemerintah. Pelabelan itu diberikan partisipan sebagai respons atas pemberitaan perihal pemilu yang paling mematikan sepanjang sejarah. Melalui pelabelan tersebut, partisipan melekatkan identitas kepada orang China sebagai sumber petaka di negara ini.

Kemudian, kosakata-kosakata yang digunakan partisipan memunculkan presuposisi bahwa orang-orang China merupakan orang kafir dan berideologi berbahaya. Dengan memberikan citra demikian, partisipan berusaha semakin menanamkan kebencian kepada orang China dan pemerintah yang dianggap sebagai bonekanya. Maka dari itu, penggunaan kosakata tersebut merupakan ujaran kebencian karena mengandung ujaran rasialisme—menghina ras lain.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan memberikan label negatif pada orang China dan pemerintah. Melalui kosakata-kosakata yang digunakan, secara ideologis partisipan berusaha membangun pemikiran bahwa keberadaan orang-orang China membawa banyak permasalahan di negara ini. Dengan memberikan citra demikian, partisipan berusaha membentuk opini bahwa orang-orang China sangatlah berbahaya dan mendapat perlindungan dari pemerintah.

Selanjutnya, kosakata-kosakata yang digunakan partisipan berusaha memberikan efek-efek sosial kepada orang-orang China. Pada level institusional berusaha membentuk opini bahwa orang-orang China merupakan benalu yang sangat berbahaya. Pada level kemasyarakatan berusaha menggiring masyarakat untuk semakin membenci orang-orang China—bahwa seolah-olah orang China semuanya jahat dan tidak ada yang beragama Islam. Usaha-usaha tersebut tampak sangat jelas melalui kosakata-kosakata yang digunakan. Hal itu bertujuan memberikan citra buruk kepada kekuasaan petahana sebagai rezim yang dianggap tidak tegas dan menjadi boneka para orang China. Fenomena bahasa yang demikian, pada masa Orde Baru digunakan untuk menyingkirkan lawan politiknya dengan memberikan tuduhan seperti kelompok subversif, komunis, ekstrim kiri, ekstrim kanan, atau dengan berbagai sebutan lainnya, sehingga kekuasaan dapat dipertahankan secara utuh (Mubaligh, 2011, hlm.6).

(10) Kosakata yang ditemukan: *pecundang* dan *seorang maniak*

Kutipan: GENERASI OPTIMIS INDONESIA #FNI #... @NyiMasRuminah:

“satu kata buat anda @prabowo *pecundang* !!!!! Anda bukan seorang prajurit tetapi *seorang maniak* yg haus akan kekuasaan. Sudah melempar batu sembunyi tangan, adalah musibah luar biasa kalau anda dipercaya jd presiden oleh kaum anda. #TangkapPrabowo”

Pada kutipan di atas terdapat kosakata *pecundang* dan *seorang maniak*. Kosakata *pecundang* bermakna ketiadaan sifat terhormat dalam diri dan kosakata *maniak* bermakna terlalu obsesif pada sesuatu. Penggunaan kedua kosakata tersebut untuk memberikan citra demikian pada orang yang dituju. Karena maknanya kasar, maka termasuk fenomena fitur lingual metafora berbentuk sarkasme.

Situasi yang terjadi pada kutipan di atas berupa pemberian label negatif kepada politisi tertentu. Partisipan memberikan label *pecundang* dan *seorang maniak* kepada Prabowo. Pelabelan itu diberikan partisipan sebagai respons atas kerusuhan yang terjadi setelah pengumuman hasil pemilu. Melalui kosakata tersebut, partisipan

memberikan identitas kepada Prabowo sebagai seorang yang tidak terhormat dan penggila kekuasaan.

Kemudian, penggunaan kosakata *pecundang* dan *seorang maniak* oleh partisipan memunculkan presuposisi terhadap Prabowo sebagai politisi yang tidak mampu berlapang dada menerima kekalahan. Presuposisi tersebut mencitrakan Prabowo sebagai politisi yang tidak layak mengikuti pertarungan. Maka dari itu, kosakata *pecundang* dan *seorang maniak* merupakan ujaran kebencian karena menghina orang lain.

Selain itu, pada kutipan di atas partisipan tampak memiliki kekuasaan memberikan pelabelan negatif kepada Prabowo. Melalui kosakata *pecundang* dan *seorang maniak*, secara ideologis partisipan berusaha membangun pemikiran bahwa Prabowo merupakan politisi yang haus kekuasaan. Dengan memberikan citra demikian, partisipan membangun opini bahwa Prabowo akan menggunakan segala cara demi meraih kekuasaan—termasuk mengorbankan banyak pendukungnya.

Selanjutnya, penggunaan kosakata *pecundang* dan *seorang maniak* oleh partisipan bertujuan untuk memberikan efek-efek sosial. Pada level institusional berusaha menggiring opini bahwa kubu oposisi memang layak tidak mendapatkan kekuasaan karena pemimpin yang diusungnya merupakan seorang maniak kekuasaan. Pada level masyarakat, partisipan berusaha menggiring pemikiran masyarakat untuk tidak memberikan kepercayaan kepada Prabowo. Usaha-usaha itu tampak jelas melalui kosakata yang digunakan oleh partisipan. Fenomena bahasa yang demikian oleh Foucault (1972, hlm. 216) dikatakan sebagai bentuk penggunaan bahasa yang tidak pernah netral dan selalu sarat dengan kekuasaan, menjatuhkan kelompok tertentu sambil mengistimewakan yang lain.

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas, penggunaan fitur lingual metafora menunjukkan kepentingan-kepentingan tersembunyi. Melalui analisis data fitur lingual metafora menunjukkan penggunaan kosakata-kosakata yang bermakna sarkasme dan perumpaan untuk memberikan identitas atau pelabelan tertentu kepada pihak yang dituju. Ujaran kebencian yang ditemukan pada fitur lingual metafora berupa penghinaan pada pribadi orang lain, identitas golongan, identitas keagamaan atau organisasi keagamaan, dan identitas kesukuan (rasialisme).

Ujaran kebencian berupa penghinaan pada pribadi orang lain ditunjukkan melalui penggunaan kosakata-kosakata *muka tembok*, *pecundang*, dan *seorang maniak*. Kosakata-kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena memuat makna yang mencemarkan nama baik dan merendahkan martabat orang yang dilabeli. Pelabelan tersebut memicu efek-efek sosial yang amat merugikan korban dan cenderung membuat orang yang dilabeli tidak berdaya menolak pelabelan yang diberikan. Hal itu sesuai dengan pernyataan Khotimah (2002, hlm. 410) bahwa pada umumnya korban tidak memiliki kemampuan menolak pelabelan sehingga menimbulkan kerugian secara sosial, psikologis, bahkan ekonomis.

Ujaran kebencian berupa penghinaan identitas golongan ditunjukkan melalui penggunaan kosakata-kosakata *politisi comberan* dan *rezim komunis*. Kosakata-kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena menggambarkan kelompok orang lain dengan sangat buruk. Penggunaan kosakata-kosakata memperlihatkan antipati yang berlebihan terhadap kelompok yang dilabeli. Menurut Simpson (2012, hlm. 701), perilaku verbal yang perilaku verbal atau tindakan komunikatif simbolis lainnya yang sengaja mengekspresikan antipati intens terhadap kelompok merupakan bentuk ujaran kebencian.

Ujaran kebencian berupa rasialisme ditunjukkan melalui penggunaan kosakata-kosakata *cina-cina kafir komunis tionghok* dan *cina kafir*. Kosakata-kosakata tersebut diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena penggunaannya menghina atau merendahkan ras orang China. Kebencian terhadap orang China merupakan sesuatu yang dipupuk sejak lama—mulai dari zaman kolonial hingga sekarang. Hal itu sesuai dengan yang dipaparkan Isnaeni (dalam Historia, edisi 25 Mei 2010) bahwa pada tahun 1740 terjadi pembantaian terhadap etnis Tionghoa di Batavia oleh VOC—terdapat korban 10.000 jiwa—pembantaian dimulai di penjara, rumah sakit, dan seantero kota. Pada Perang Jawa (tahun 1825-1830) pembantaian dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono I—anak-anak dan perempuan turut dibantai—tubuh yang terpotong-potong dibiarkan berserakan di muka pintu dan di jalanan. Pada awal abad ke-20, terjadi kerusuhan di Solo (tahun 1912) dan kerusuhan di Kudus (tahun 1918). Pada masa revolusi, terjadi di Tangerang pada Mei-Juli 1946, Bagan Siapi-api pada September 1946, dan Palembang pada Januari 1947. Pada tahun 1965 pembantaian terhadap etnis Tionghoa terjadi di Makassar, tahun 1966 di Medan, dan tahun 1967 di Kalimantan Barat karena dituduh bekerja sama dengan komunis. Kemudian pada tahun 1998 yang dikenal dengan istilah Mei Kelabu, terjadi penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa.

Kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi atas etnis Tionghoa merupakan konsekuensi logis dari kebencian yang dirawat dengan masif. Dhani (dalam Tirto.id, edisi 1 September 2016) mengatakan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh penguasa, baik Belanda maupun Jawa. Kebencian itu juga semakin mengakar semenjak Soeharto menerapkan politik pecah-belah. Soeharto mengeluarkan berbagai regulasi yang amat mendiskriminasi etnis Tionghoa mulai dari membatasi aktivitas kebudayaan etnis Tionghoa hingga melekatkan identitas yang memosisikan etnis Tionghoa sebagai bukan bagian dari Indonesia dengan adanya istilah pribumi dan nonpribumi. Hal itu sesuai dengan pernyataan Freedman (2003, hlm. 439) bahwa di bawah pimpinan Soeharto, politik dan institusi di Indonesia berusaha memaksa etnis Tionghoa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di Indonesia, tetapi tetap melihat mereka sebagai yang berbeda dari pribumi Indonesia. Kemudian, dipertegas oleh Tan (2014, hlm. 52-53) bahwa perlakuan paling diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dilakukan oleh Soeharto secara sistematis dan nyata sejak kemerdekaan melalui penjulukan Cina yang membenarkan segala kebijakan dan ditindakan yang ditujukan kepada mereka.

Selain itu, pelabelan komunis juga merupakan ujaran kebencian yang amat berbahaya. Pelabelan itu melekatkan identitas kepada pihak yang dilabeli dengan identitas pengkhianat bangsa, anti-Pancasila, dan anti-Tuhan. Pada zaman Orba pelabelan komunis memiliki konsekuensi logis yang mengerikan. Mereka yang dilabeli demikian hanya memiliki dua pilihan: dibunuh atau dimatikan kariernya—dialienasi sedemikian rupa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu senada dengan pernyataan Waziz (2017, hlm. 268) bahwa orang-orang yang dilabeli sebagai komunis akan kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dalam hal ini, mereka yang diberikan julukan demikian tidak diperlakukan secara manusiawi lagi. Hal itu bisa dilihat pada peristiwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa karena dituduh berpihak dengan komunis dalam kerusuhan turunnya Soekarno dan naiknya Soeharto pada tahun 1965 (Tan, 2014, hlm. 51).

Simpulan

Pada wacana ujaran kebencian di Twitter ditemukan penggunaan fitur lingual berwujud kosakata oleh partisipan untuk memberikan pelabelan negatif kepada pihak tertentu. Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, ditemukan simpulan bahwa partisipan menggunakan kosakata-kosakata yang ujaran kebencian dengan maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud terselubung tersebut diwadahi dalam penggunaan fitur kosakata berupa nilai eksperensial.

Nilai eksperensial terepresentasi dalam penggunaan fitur lingual berupa kelebihan penyusunan kata, kata-kata ideologis, dan metafora. **Kelebihan penyusunan kata** berupa penggunaan kosakata-kosakata yang berdekatan maknanya untuk memberikan kesan makna yang berlebihan. Kelebihan penyusunan kata merepresentasikan ujaran kebencian berbentuk penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan penghinaan pada ras atau kesukuan (rasialisme). **Kata-kata ideologis** berupa penggunaan kosakata-kosakata secara berulang untuk menanamkan atau menegaskan citra tertentu kepada pihak yang dituju. Kata-kata ideologis merepresentasikan ujaran kebencian berupa penghinaan pada pribadi orang lain, penghinaan pada identitas golongan, dan penghinaan berupa seksisme—diskriminasi identitas jenis kelamin dan gender. Selanjutnya, **metafora** berupa penggunaan kosakata-kosakata yang bermakna sarkasme dan perumpamaan untuk memberikan identitas atau pelabelan tertentu kepada pihak yang dituju. Metafora merepresentasikan ujaran kebencian berupa penghinaan pada pribadi orang lain, identitas golongan, dan identitas kesukuan (rasialisme).

Daftar Pustaka

- Ahnaif, M.I., & Suhadi, S. (2014). Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Harmoni*, 13 (3), 153-164.
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341-364.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial pada pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anshori, D. S. (2008). Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat Dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia. In *Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional "Peluang dan Tantangan Pengajaran Bahasa Indonesia pada Era Kejagatan dan Situasi Multikultural, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia SPS UPI*.
- Anshori, D.S. (2017). *Analisis Wacana: Teori, Aplikasi, dan Pembelajaran*. Bandung: UPI Press.
- Barthelemy, R.S., McCormick, M., & Henderson, C. (2016). Gender Discrimination in Physics and Astronomy: Graduate Student Experiences of Sexism and Gender Microaggression. *American Physical Society*, 12(2), 1-14.
- Becker, H.S. (1973). *Outsiders: Studies in Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. New York: Oxford University Inc.

- CNBC Indonesia .(2018). *Jumlah Pengguna Turun, Saham Twitter Anjlok 18%*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180727185057-17-25813/jumlah-pengguna-turun-saham-twitter-anjlok-18>.
- Cresswell, J.W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhani, A. (2016). "Sejarah Pembantaian Etnis Tionghoa". *Tirto.id*, 1 September 2016. Diakses dari <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp>.
- Erjavec, K., & Kovačič, M. P. (2012). "You Don't Understand, This is a New War!" Analysis of Hate Speech in News Web Sites' Comments. *Mass Communication and Society*, 15(6), 899–920.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis Group.
- Fairclough, N. (2003). *Language and Power*. Diterjemahkan Oleh Indah Rohmani dengan judul *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Malang: Boyan Publishing.
- Freedman, A. (2003). Political institutions and ethnic Chinese identity in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 439-452.
- Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Pantheon.
- Fowler, R. (1986). *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Katadata.co.id. (2016). *Indonesia Pengguna Twitter Terbesar Ketiga di Dunia*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/22/indonesia-pengguna-twitter-terbesar-ketiga-di-dunia>.
- Khotimah, E. (2002). Media massa dan labelling terorisme (suatu analisis terhadap skenario agenda setting global dan nasional). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(4), 399-413.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1-15.
- Isnaeni, H.F. (2010). "Duka Warga Tionghoa". Artikel *Historia*, 25 Mei 2010. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/duka-warga-tionghoa-DbKmv>.
- Mardiyati, I. (2017). Fenomena Hate Speech di Sosial Media dalam Perspektif Psikologi Islam. *At-Turats*, 11 (1), 31-38.
- Miro-Llinares, F. & Rodriguez-Sala, J.J. (2016). Cyber Hate Speech on Twitter: Analyzing Disruptive Events from Social Media to Build a Violent Communication and Hate Speech Taxonomy. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, 11(3), 406-415.
- Mubaligh, A. (2011). Relasi bahasa dan ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 5(2).
- Perdana, I. G. N. J. (2014). Diskriminasi Dan Rasialisme Dalam Film "Australia"(Studi Analisis Semiotik Film Australia). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2).
- Santoso, A. (2012). *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, A. (2016). Studi Wacana Kritis, Pengajaran Bahasa Indonesia, dan Perspektif Emansipasi. *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, 43(2).
- Simpson, R. M. (2012). Dignity, Harm, and Hate Speech. *Law and Philosophy*, 32(6), 701–728.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

- Tan, M. G. (2014). Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan Berdasarkan Jender di Indonesia: Dari Penjulukan ke Diskriminasi ke Kekerasan. *Antropologi Indonesia*.
- Widodo, L.A., Prayitno, H. J., Hum, M., & Hum, M. (2017). *Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik Dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Walby, S. (2014). *Theorizing Patriarchy*. Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela dengan judul *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wazis, K. (2017). Media Massa Melawan Teror: Analisis Framing pada Tajuk Koran Republika. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 257-276.